



na- wa- la

Maret Edisi 3 Vol. 7

Gedung Merah Putih KPK
Lt. 1, Jalan Kuningan Persada
Kav. 4, Setiabudi
Jakarta Selatan, 12950

E-mail : perpustakaan@kpk.go.id
Telp. (021) 25578300, ext. 8642
perpustakaan.kpk.go.id



buku bulan ini!

*Riak-Riak Otonomi Daerah di Indonesia
Kurun Waktu 2010-2021
Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si.*

Bangsa Indonesia sudah lebih dari 120 tahun lamanya menyelenggarakan desentralisasi sebagai salah satu asas dalam pemerintahan Negara. Akibat desentralisasi ini, banyak pemerintah daerah terkesan hanya sebagai pepesan kosong dalam kerja mewujudkan pembangunan. Kemudian muncul dua terminologi penting, yakni pemerintah daerah dan pembangunan. Pemerintah daerah ada dalam bangun sistem pemerintahan nasional sebuah bangsa dan pembangunan sendiri multidimensi dan berdampak luas. Lalu kenapa pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tidak berjalan dengan optimal seperti yang diharapkan oleh bangsa Indonesia? Isu pelaksanaan pemerintahan daerah tidak pernah sepi di negara ini. Apalagi isu penataan kembali otonomi daerah di Indonesia mengemuka, dimana perihal ini merupakan tantangan eksistensial karena menyangkut keberadaan negara-bangsa bahkan derajatnya dapat naik menjadi sebuah ancaman layaknya isu korupsi dan terorisme. Hal penataan otonomi daerah terasa menjadi ancaman ke depan karena makin kuatnya gerak-sentrifugal. Sekali kita keliru mengelola otonomi daerah, akibatnya akan fatal terhadap NKRI.



Buku ini sangat cocok untuk orang yang menekuni bidang ilmu administrasi sebab dapat memacu pengembangan pemikiran ilmiah di bidang tersebut dan mendorong para pengambil kebijakan untuk berinovasi. Hal ini dapat dilihat bahwa didalamnya memiliki landasan teoretis yang logis dan kuat, serta memiliki kedalaman Bahasa dan pandangan terasa meskipun bidang yang diulas cukup luas sehingga hal ini menjadi sebuah nilai plus. Buku ini juga menyajikan uraian analisis terkait persoalan otonomi dan pemerintahan daerah di Indonesia untuk dapat menjadi refleksi kehidupan berbangsa dan negara Indonesia. Adapun uraiannya berupa pandangan penulis terhadap permasalahan otonomi yang berkembang pada kurun waktu tertentu, berbagai persoalan otonomi dan pemerintahan daerah di Indonesia pada rentang waktu tersebut dan disertakan antisipasi masa depan. Tiidak kalah menarik buku ini memaparkan isu-isu strategis hubungan pusat dan daerah, otonomi Yogyakarta, otonomi Papua, soal kedudukan gubernur, kedudukan wakil kepala daerah dan beberapa isu menarik lainnya.

Buku ini merupakan buku referensi akademik yang bersifat populer dan dibiarkan langsung mengupas gejala empiris otonomi daerah yang menjadi sorotan dari awal hingga akhir bab buku. Buku ini sangat menarik untuk dibaca untuk berbagai kalangan dan bagi yang menggeluti bidang ilmu administrasi. Jadi tunggu apalagi nih, yuk baca buku Riak-Riak Otonomi Daerah di Indonesia Kurun Waktu 2010-2021 di Perpustakaan KPK!

| | |
|--------------|-----------------------|
| Penulis | : Irfan Ridwan Maksum |
| Penerbit | : Deepublish |
| Tahun Terbit | : 2021 |
| Tebal Buku | : xii + 300 |
| ISBN | : 978-623-02-3518-4 |

Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia: Perspektif *Collaborative Governance*

Anis Wijayanti dan Azhar Kasim

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak dapat diberantas oleh satu pihak saja. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) merupakan upaya terintegrasi pemerintah sebagai komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan studi literatur untuk mengetahui bagaimana implementasi Stranas-PK dari perspektif pemerintahan kolaboratif menggunakan teori (Emerson dan Nabatchi, 2015). Hasil analisis, implementasi Stranas-PK sudah mulai menunjukkan adanya tata kelola kolaboratif di sebagian implementasi aksinya. Namun, berdasarkan laporan Setnas-PK, pengawasan kelompok masyarakat sipil dan beberapa penelitian masih ditemukan beberapa hambatan yang perlu diperbaiki berupa: (1) Penyesuaian payung hukum; (2) Pemenuhan kualitas dan kapasitas sumberdaya; (3) Membentuk model partisipasi masyarakat sipil; (4) Peningkatan keterlibatan aktor non-pemerintah; (5) Peningkatan keterlibatan K/L/PD dan (6) Mengukur dampak implementasi.

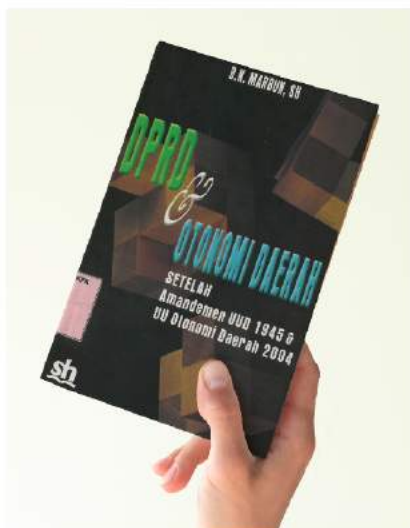


Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Marsh & McConnell

Elih Dalilah dan Vishnu Juwono

Kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara terus meningkat. Namun, akuntabilitas LHKPN masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan terutama pada pencapaian *output* dan *outcome* (dimensi program). Penelitian menggunakan paradigma *post positivism* dengan metode kualitatif. Sumber data berupa wawancara mendalam dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan pada dimensi program, LHKPN berhasil dalam pencapaian indikator operasional, penggunaan sumber daya yang efisien dan memiliki implikasi yang positif pada sebagian penyelenggara negara. Pada indikator *outcome*, LHKPN belum mampu membentuk integritas penyelenggara negara. KPK perlu mendorong regulasi lingkup nasional yang mengatur kewajiban LHKPN lebih terperinci disertai dengan sanksi yang tegas, dan meningkatkan kualitas SDM pemeriksa LHKPN berbasis investigasi, pemeriksaan menggunakan *machine learning*, *artificial intelligence* (AI), serta melibatkan masyarakat dalam forum konsorsium investigasi LHKPN.





DPRD dan Otonomi Daerah: Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004

Buku ini menguraikan eksistensi DPRD sejak 1945 sampai sekarang mulai dari eksistensi, pertumbuhan dan suka duka DPRD sejak 1945 sampai saat ini.



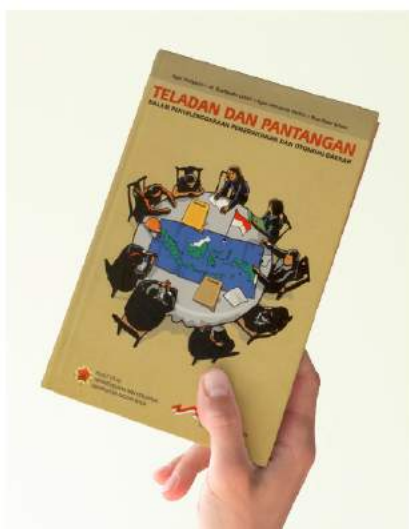
Otonomi Daerah dan Daerah Otonom

Buku ini membahas pembicaraan pokok antara kewenangan dan kelembagaan, pengaturan personil, pelayanan daerah, pengaturan aset, serta perimbangan pusat dan daerah.



Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia: Pembelajaran dari Kasus Aceh, Papua, Jakarta dan Yogyakarta

Buku ini menjadi mengupas persoalan pelaksanaan otonomi khusus pada beberapa daerah di Indonesia.



Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Buku ini dapat membantu merumuskan masalah kebijakan yang strategis untuk memperbaiki kebijakan otonomi daerah.



Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Buku ini memaparkan proses desentralisasi di Indonesia secara lebih komprehensif dan disajikan secara menyeluruh.



Kinerja Otonomi Khusus Papua

Buku ini memberikan gambaran komprehensif tentang pelaksanaan, kondisi, kendala, keberhasilan dan harapan dalam pelaksanaan otonomi khusus di Tanah Papua.